

Klaim Aset Tertata

Tim Audit BPK Mulai Bekerja

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menegaskan, di masa kepemimpinannya, proses penataan, pencatatan dan pengelolaan aset sudah lebih baik dibandingkan periode lalu. Buktinya, pemprov sudah berhasil meraih opini wajar dengan pengecualian

(WDP) berdasarkan pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2010.

Sementara pada pemerintahan periode lalu, pemprov hanya mendapat predikat *disclaimer opinion*. "Di zaman saya semua tercatat, dibangun di mana, semuanya dibuat berita acara, dicatat dan diserahkan kepada pengelolaan aset sejak 2009. Sudah naik peringkat, dulu *disclaimer*," ujarnya saat ditemui di sela-sela Sidang

Pariपुरna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010 di DPRD, Senin (25/7).

Cornelis mengungkapkan hal ini mengingat dalam sidang tersebut, sejumlah fraksi kembali menyoroti persoalan aset. Fraksi-fraksi di DPRD menyampaikan kritik tentang

pengelolaan aset yang dinilai belum baik, misalnya dari Fraksi Golkar, Fraksi PPP dan Fraksi PAN.

"Ganas benar Golkar itu ya, tapi dia tidak bicara ta-

lun 2010. Dia bicara masa lalu, masa lalu siapa yang berkuasa? Memangnya Cornelis!" kata gubernur. Menurut Cornelis, ada indikator lain yang juga menunjukkan

bahwa pengelolaan aset di pemprov sudah lebih maju dibandingkan dulu.

Indikator tersebut yaitu adanya instansi khusus yang menangani aset yakni Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan. Pembentukan instansi khusus ini sebetulnya sudah sejak lama diperintahkan oleh undang-undang, tetapi baru direalisasikan di masa kepemimpinannya.

METRO
HARI INI



Klaim Aset Tertata

Sambungan dari halaman 9

Mengingat usia dari Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan itu yang relatif masih seumur jagung, dia berharap semua pihak dapat memaklumi jika proses pembenahan terhadap pengelolaan aset ini masih belum optimal. "Berapa hari sih umurnya, memangnya sudah lama. Sudah lama perintah undang-undang, tetapi baru saya yang buatnya. Bukan saya nyombong, proporsionallah," ujar dia.

Terkait dengan upaya pembenahan, menurutnya tim dari BPK akan melakukan audit. Sejak kemarin, tim tersebut sudah mulai bekerja. Hasil audit BPK itu nanti akan diserahkan kepada DPRD. "Saya tidak ada ambil aset, mobil, rumah. Nanti diaudit semua sama BPK. Hasil itu yang kita serahkan ke dewan, mana yang ada suratnya, mana yang tidak ada, mana yang sudah di-dum, ketahuan nanti dari BPK. Hari ini BPK sudah masuk," jelasnya. Mantan Bupati Landak itu juga menyebutkan, masalah-masalah yang ditemukan dalam pengelolaan aset cenderung sebagai warisan dari masa lalu.

Sebelumnya, Jurubicara Fraksi Golkar, Andry Hudaya mengatakan, pengelolaan aset dan kekayaan daerah Kalbar sampai tahun keempat

periode gubernur masih juga belum tuntas. Padahal aset adalah merupakan neraca dan modal pembangunan daerah.

"Bagaimana anggaran pendapatan dan belanja daerah bisa dijamin tingkat akuntabilitasnya kalau pengelolaan aset daerah masih tidak tertata dengan baik," kata Andry saat membacakan pemandangan umum fraksi.

Hal ini dinilai telah menunjukkan betapa lemahnya manajemen pemprov. Karena itu, Fraksi Golkar mendesak pimpinan dewan agar segera membentuk Pansus Aset. Di dalam pansus ini, akan dikaji tentang masalah-masalah aset, termasuk kerjasama aset KONI dengan pihak ketiga.

Desakan serupa juga disampaikan Fraksi PPP melalui jurubicaranya Miftah. Menurut Miftah, sejak awal pihaknya mendesak agar Pansus Aset dibentuk. Soalnya, sejak tahun lalu BPK telah merekomendasikan agar masalah aset dibenahi. Namun kenyataannya, di tahun 2010, masalah aset tidak kunjung tertata dengan baik. Malah, masalah aset ini pulalah yang justru kembali menjadikan kinerja gubernur tentang bertahan di predikat WDP.

"Artinya tidak ada peningkatan kinerja saudara gubernur dari tahun 2009 ke tahun 2010 dalam hal penataan dan

pengelolaan aset," ujarnya. Hal lain yang dirasakan cukup mengkhawatirkan adalah banyaknya aset pemprov yang belum disertifikatkan dan belum atas nama pemprov.

Bahkan ada tanah pemprov yang tidak diketahui dengan jelas luasnya. Lemahnya penataan dan pengelolaan aset daerah dianggap membuka peluang terjadinya penyimpangan dan persoalan di kemudian hari. Karena itu, Fraksi PPP mendesak gubernur lebih serius melakukan penataan dan pengelolaan aset.

Syafarudin Hum, dari Fraksi PAN juga menyampaikan kritik mengenai pengelolaan aset. Fraksi ini mendesak pemprov segera melakukan langkah konkret dalam membenahi masalah pengelolaan aset dan barang milik daerah yang menjadi temuan BPK RI. Masalah aset itulah yang dinilai mengakibatkan pemprov mendapat opini WDP (sama dengan tahun sebelumnya). Perbaikan-perbaikan dirasakan perlu agar ke depan pemprov dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Fraksi PAN juga mendesak agar Pansus Aset Daerah segera dibentuk guna memperjelas status aset sehingga pendayagunaannya bisa dilakukan lebih efektif, tepat guna, optimal dan menguntungkan bagi daerah. (rnl)